

Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Gorontalo

Ikal Taha, Rio Monoarfa, Mentari Rizki Sawitri Pilomonu

Universitas Negeri Gorontalo

ikaltaha88@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the government internal control system (SPIP) is implemented in the Gorontalo city government. This research uses qualitative research methods, the data source used is primary data where this research uses in-depth interview data collection techniques based on the SPIP elements contained in Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the government's internal control system. This research examines the control environment in the Gorontalo City Government, highlighting clear policies, high ethical values, and strong commitment in government management. Although significant steps have been taken, there are several aspects that require further attention. Evaluation of the organizational structure, improving communication, and adjusting roles and responsibilities were identified as potential solutions to improve internal control performance. In addition, the importance of information system security is also emphasized as the main focus for continued improvement. Nevertheless, the Gorontalo City Government shows a clear commitment to improving the control system by considering continuous evaluation to ensure efficiency and effectiveness in government tasks. Steps such as risk evaluation, implementing controls, monitoring information systems, and improving communications and information technology infrastructure are proposed as an effort to improve control performance and increase coordination and access to relevant information in the Gorontalo City Government.

Keywords: SPIP, Evaluation of Regional Government Performance, Gorontalo City OPD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pemerintah kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dimana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan berdasarkan unsur-unsur SPIP yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini mengkaji lingkungan pengendalian di Pemerintah Kota Gorontalo, menyoroti kebijakan yang jelas, nilai etika yang tinggi, dan komitmen kuat dalam pengelolaan pemerintahan. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah yang signifikan, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Evaluasi terhadap struktur organisasi, peningkatan komunikasi, dan penyesuaian peran dan tanggung jawab diidentifikasi sebagai solusi potensial untuk meningkatkan kinerja pengendalian intern. Selain itu, pentingnya keamanan sistem informasi juga ditekankan sebagai fokus utama untuk perbaikan lanjutan. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan komitmen yang jelas untuk memperbaiki sistem pengendalian dengan mempertimbangkan evaluasi berkelanjutan guna memastikan efisiensi dan efektivitas dalam tugas-tugas pemerintahan. Langkah-langkah seperti evaluasi risiko, penerapan

pengendalian, pemantauan sistem informasi, dan perbaikan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi diusulkan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pengendalian dan meningkatkan koordinasi serta akses terhadap informasi yang relevan di Pemerintah Kota Gorontalo.

Kata kunci: SPIP, Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, OPD Kota Gorontalo

PENDAHULUAN

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Gorontalo merupakan hal yang penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Namun, evaluasi terhadap implementasi SPIP menjadi krusial untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana SPIP diimplementasikan di Pemerintah Kota Gorontalo. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi tantangan dan masalah yang muncul dalam proses implementasi SPIP. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Gorontalo dan di tingkat lokal lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah kota Gorontalo. Metode penelitian kualitatif digunakan karena fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara. Data primer dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan pihak BPKP Provinsi Gorontalo dan perwakilan dari masing-masing Dinas terkait. Informan penelitian terdiri dari berbagai jabatan di instansi terkait. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Kehadiran peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai pengamat berpartisipasi pasif, dengan tujuan membangun hubungan emosional dan memudahkan pengumpulan informasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimulai dengan transkripsi wawancara dan dilanjutkan dengan reduksi data untuk mengekstraksi informasi penting yang sesuai dengan konteks penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi SPIP di pemerintah kota Gorontalo, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SPIP pada Pemerintah Kota Gorontalo

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan tentang pengendalian intern pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan 5 unsur pengendalian dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal (3) Ayat (1). Adapun pembahasan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan di dinas-dinas yang ada di kota Gorontalo berdasarkan 5 unsur adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian di Kota Gorontalo menyoroti aspek-aspek kunci yang menciptakan kerangka kerja yang kondusif untuk pengendalian intern di lembaga pemerintah. Langkah-langkah yang telah diambil meliputi pembentukan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Pelanggaran etika sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance* seperti yang dikatakan oleh Budiman et.al, Pelanggaran etika dan etika tetap, mulai dari konstruksi, implementasi, hingga evaluasi, sangat tidak seimbang demi kepentingan tertentu. Proses pelaksanaan *good governance* masih memiliki penyimpangan, semua dengan tampilan ketidakadilan, kurangnya transparansi, kurangnya umpan balik, kurangnya partisipasi, kurangnya akuntabilitas, dan lain-lain (Budiman et.al, 2022).

Lingkungan pengendalian yang efektif membutuhkan kejelasan dalam struktur organisasi dan tanggung jawab. Di Kota Gorontalo, hal ini tercermin dalam penyusunan kebijakan dan prosedur yang mencakup peran dan kewenangan setiap bagian dalam pengendalian intern. Selain itu, lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal. Dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, tentunya membutuhkan integritas dan nilai etika yang tinggi. Hal ini dikuatkan oleh Sedarmayanti and Nurliawati (2012) bahwa pengembangan nilai etika dapat berfungsi sebagai pengendali, pedoman dan pengelolaan yang masing-masing dari itu terdapat mekanisme akuntabilitas yang efektif, nilai-nilai dan standarisasi profesional, dalam mengelola birokrasi untuk mencapai pengelolaan pelayanan publik yang berintegritas.

Upaya untuk menyebarkan kebijakan, prosedur, serta informasi terkait pengendalian intern secara terbuka dan jelas merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan. Evaluasi rutin terhadap efektivitas lingkungan pengendalian juga menjadi fokus dalam pembahasan. Proses evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem yang ada, memastikan bahwa lingkungan pengendalian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pimpinan dalam organisasi pengawas internal juga merupakan hal yang paling penting dalam lingkungan pengendalian. Pimpinan mempunyai kewajiban dalam menjamin keberlangsungan lingkungan

pengendalian serta bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan pengendalian (Koutoupis dan Malisiovas, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Andreas Corsini (2022), menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang yang dipraktikkan di Inspektorat Kabupaten Nagekeo mendapatkan indeks 0,25 atau masih dalam klasifikasi kurang memadai. Hal yang menjadi penyebab akan hal ini adalah masih kurangnya penetapan aturan pendelegasian kewenangan yang dibuat secara formal, sehingga terjadi bias pada batasan kewenangan yang didelegasikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pada konteks lingkungan pengendalian, pimpinan selalu mengawasi setiap proses pengendalian intern yang dilakukan oleh jajarannya sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. Batasan kewenangan harus selalu dikawal melalui aturan formal yang telah didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Namun masih ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam unsur lingkungan pengendalian seperti pada struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan observasi terhadap struktur organisasi Dinas Kota Gorontalo, terdeteksi beberapa masalah potensial. Salah satunya terkait efisiensi operasional terganggu mungkin akibat tata kerja yang kurang optimal. Kurangnya koordinasi antar unit juga menjadi faktor utama yang menghambat aliran informasi di berbagai bagian dinas. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan struktur organisasi agar lebih sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saat ini karena perubahan kebutuhan dapat berdampak signifikan pada kinerja keseluruhan.

Kesimpulannya, pembahasan mengenai lingkungan pengendalian di Kota Gorontalo menunjukkan komitmen untuk membangun kerangka kerja yang kokoh dan transparan. Secara keseluruhan penerapan unsur lingkungan pengendalian pada pemerintah Kota Gorontalo dilaksanakan dengan baik, namun beberapa perbaikan seperti yang sudah dijelaskan di atas yang penyelesaian masalahnya dengan melibatkan evaluasi ulang struktur organisasi, peningkatan dalam komunikasi, serta penyesuaian peran dan tanggung jawab.

2. Analisis Risiko

Analisis risiko yang dilakukan di Pemerintah Kota Gorontalo melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan organisasi. Pembahasan terfokus pada identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang mungkin timbul dalam berbagai aspek operasional dan kebijakan. Setiap dinas atau instansi pemerintah sudah harus mengidentifikasi dan memetakan berbagai risiko yang dihadapi, melakukan analisis seberapa mungkin risiko tersebut bakal terjadi, sekaligus melakukan *action plan* untuk mengatasi jika risiko tersebut benar-benar terjadi (Kemal Hidayah dan Rustan A. 2015).

Proses analisis risiko dimulai dengan identifikasi risiko potensial yang bisa mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, dan lainnya. Di Kota Gorontalo, analisis risiko ini mencakup peninjauan terhadap berbagai kegiatan

pemerintahan, dari program strategis hingga proses operasional sehari-hari. Selanjutnya, evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi. Hal ini memungkinkan untuk menentukan risiko mana yang memiliki prioritas tinggi untuk dikelola atau dicegah lebih lanjut.

Dalam pembahasan analisis risiko di Pemerintah Kota Gorontalo, terdapat penekanan pada pengembangan strategi mitigasi. Ini termasuk penggunaan langkah-langkah preventif, perencanaan tanggap darurat, dan rencana pemulihan jika risiko terjadi. Selain itu, evaluasi risiko ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang tepat. Ini membantu pemerintah kota untuk menentukan alokasi sumber daya yang efisien dalam mengatasi risiko yang diidentifikasi.

Pembahasan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam menghadapi risiko secara proaktif, memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efektif dan efisien. Penetapan tujuan yang jelas menjadi poin penting dalam mengarahkan aktivitas pemerintah kota. Dengan tujuan yang terukur, proses identifikasi dan evaluasi risiko menjadi lebih terfokus, memungkinkan perbaikan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan. Langkah-langkah perbaikan yang diambil seiring evaluasi risiko mengindikasikan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, pengembangan sistem informasi serta pelatihan pegawai secara berkala menjadi strategi yang penting dalam menjaga kesesuaian dengan perkembangan teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi dan peningkatan kompetensi pegawai, Pemerintah Kota Gorontalo siap menghadapi dinamika yang terus berkembang. Evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa SPIP berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi ini, terlihat komitmen pemerintah kota dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian intern untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

3. Kegiatan Pengendalian

Dalam Pemerintah Kota Gorontalo, kegiatan pengendalian merupakan upaya terstruktur untuk memastikan bahwa proses operasional dan kebijakan pemerintahan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian adalah prosedur atau kebijakan yang dilaksanakan agar dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan dari pimpinan instansi untuk mengurangi risiko yang telah terlebih dahulu diidentifikasi selama proses penilaian risiko (Irma D, Siti A. K. 2020). Pembahasan terkait kegiatan pengendalian di Kota Gorontalo mencakup beberapa aspek penting.

a. Pembentukan Lingkungan Pengendalian

Langkah pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengendalian intern. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang jelas serta komunikasi yang terbuka terkait dengan tata kelola pemerintahan.

b. Penetapan Tujuan dan Evaluasi Risiko

Pemerintah Kota Gorontalo melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap berbagai risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan. Evaluasi risiko ini membantu dalam menentukan prioritas pengendalian yang perlu dilakukan.

c. Penerapan Pengendalian

Setelah identifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah menerapkan pengendalian yang sesuai. Ini termasuk kebijakan pengendalian, prosedur operasional, dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan risiko.

d. *Monitoring* dan Evaluasi Berkala

Pemerintah Kota Gorontalo melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap efektivitas pengendalian yang diterapkan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sesuai dengan rencana dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Pembahasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam membangun sistem pengendalian yang kuat dan efektif. Langkah-langkah yang diambil memastikan bahwa setiap aspek operasional dijalankan dengan baik, serta risiko-risiko yang mungkin muncul dapat diatasi dengan tepat dan tepat waktu kegiatan pengendalian adalah prosedur atau kebijakan yang dilaksanakan agar dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan dari pimpinan instansi untuk mengurangi risiko yang telah terlebih dahulu diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Namun tetap juga masih ada beberapa yang perlu diperhatikan masih ada perhatian utama terkait keamanan sistem informasi yang belum terselesaikan. Sistem pengendalian informasi yang lemah menjadi sorotan utama, dengan isu-isu seperti kekurangan keamanan data, potensi kebocoran informasi, dan ketidaksesuaian terhadap kebijakan pengelolaan data yang telah ditetapkan. Hal ini masih menjadi perhatian penting bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

4. Informasi Dan Komunikasi

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Gorontalo mengintegrasikan informasi dan komunikasi sebagai bagian integral dari proses pengendalian. Menurut Prastya, Y. R. (2020) Informasi dan komunikasi menjadikan salah satu faktor penting didalam berjalannya unsur pengendalian intern. Dalam konteks ini, pembahasan terkait informasi dan komunikasi meliputi beberapa aspek penting:

a. Pengelolaan Informasi yang Efisien

Pemerintah Kota Gorontalo memfokuskan upaya pada manajemen informasi yang efisien. Ini melibatkan penyusunan pedoman, kebijakan, dan prosedur untuk pengelolaan informasi yang tepat, termasuk identifikasi, penyimpanan, dan penggunaan informasi yang akurat dan relevan.

b. Komunikasi Internal yang Efektif

Implementasi SPIP di Kota Gorontalo mendorong komunikasi yang efektif di antara berbagai unit dan tingkatan dalam pemerintahan. Ini mencakup penggunaan berbagai saluran komunikasi, seperti rapat, memo, surat edaran, dan teknologi informasi, untuk memastikan arus informasi yang lancar dan tepat waktu.

c. Akses Terhadap Informasi yang Relevan

Pemerintah Kota Gorontalo menekankan pentingnya akses yang mudah terhadap informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan pengembangan sistem informasi yang memadai dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya.

d. Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Sistem Informasi

Ada upaya terus-menerus untuk memantau dan mengevaluasi sistem informasi yang digunakan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai kebutuhan, aman, dan memenuhi standar keamanan informasi yang diperlukan.

Pembahasan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengintegrasikan informasi dan komunikasi yang efektif sebagai bagian krusial dari SPIP. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikelola dan disampaikan oleh pemerintah berfungsi secara efisien dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Meskipun ada keberhasilan dalam infrastruktur komunikasi di pemerintah kota Gorontalo, masih terdapat kemungkinan beberapa dinas menghadapi tantangan terkait informasi dan komunikasi. Menurutnya, kurangnya koordinasi antar unit menjadi permasalahan utama yang menghambat penyebaran informasi. Selain itu, terbatasnya akses terhadap teknologi informasi juga turut berkontribusi, semakin mempersulit penyebaran informasi ke masyarakat dan menghambat akses publik terhadap informasi yang diperlukan.

Namun yang harus dilakukan oleh dinas yang masih mengalami permasalahan mengenai sarana informasi dan komunikasi yaitu Dengan melakukan peninjauan ulang terhadap infrastruktur komunikasi yang ada untuk memastikan keandalannya serta memperbaiki atau meningkatkan sistem yang sudah ada agar lebih efisien dan mudah diakses oleh semua unit, disertai dengan penyelenggaraan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait teknologi informasi yang digunakan dalam komunikasi internal dan melatih keterampilan komunikasi interpersonal serta efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat, diharapkan tercipta perbaikan yang

signifikan dalam hal koordinasi, akses terhadap teknologi informasi, dan efektivitas penyebaran informasi di dinas kota Gorontalo.

5. Pemantauan

Pemerintah Kota Gorontalo menekankan pentingnya pemantauan sebagai elemen krusial dalam proses pengendalian. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai pemantauan dalam SPIP mencakup beberapa aspek penting:

a. Pemantauan Kegiatan Operasional

SPIP membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kegiatan operasional di setiap unit atau bagian pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

b. Evaluasi Kinerja dan Capaian Tujuan

Ada upaya yang dilakukan untuk secara teratur mengevaluasi kinerja berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian target, kinerja individu atau tim, serta kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Identifikasi Risiko dan Pengelolaannya

Pemantauan juga melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah atau hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.

d. Pengawasan Terhadap Kepatuhan dan Akuntabilitas

SPIP di Pemerintah Kota Gorontalo menekankan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta memastikan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh unit atau individu.

Pentingnya tingkat pemantauan dalam sebuah organisasi bervariasi sesuai dengan faktor-faktor lain dari SPIP yang memengaruhi, untuk memastikan bahwa penyimpangan diminimalkan dan pencapaian tujuan organisasi terjadi secara efisien. Sinamo (2010: 24) mendefinisikan pemantauan sebagai proses mengevaluasi seberapa baik sistem pengendalian internal berfungsi dalam jangka waktu tertentu, yang mencakup penilaian desain, operasionalitas pengendalian, serta penerapan perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan yang berlangsung terus-menerus, evaluasi yang terpisah, dan implementasi rekomendasi hasil audit dan tinjauan lainnya. Pendapat tersebut seiras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani dkk. 2012, kegiatan evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian internal sendiri atau oleh lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat, serta pihak eksternal seperti BPK. Inspektorat melakukan evaluasi melalui pemeriksaan rutin atau situasional sebagai sistem peringatan dini terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dijalankan untuk tindak lanjut.

Pembahasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk menjadikan pemantauan sebagai instrumen utama dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan SPIP. Dengan memantau secara terus-menerus, pemerintah berusaha memperbaiki dan meningkatkan proses serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Lingkungan pengendalian di Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan, prosedur yang jelas, dan nilai etika yang tinggi. Meskipun demikian, beberapa aspek perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengendalian intern. Evaluasi terhadap struktur organisasi, peningkatan komunikasi, dan penyesuaian peran serta tanggung jawab dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem pengendalian. Meskipun upaya mitigasi risiko dan implementasi langkah-langkah pengendalian telah dilakukan secara efektif, fokus pada keamanan sistem informasi menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

Dalam konteks ini, kami memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperkuat sistem pengendalian mereka:

1. Perbaikan Sistem Keamanan Informasi: Perhatian khusus harus diberikan pada aspek keamanan data, kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan data, dan pemenuhan standar keamanan informasi yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Struktur Organisasi: Tinjau kembali struktur organisasi untuk memastikan keterpaduan dengan tugas dan tanggung jawab saat ini, memperbaiki koordinasi antar unit, serta meningkatkan aliran informasi di berbagai bagian.
3. Peningkatan Komunikasi: Penguatan saluran komunikasi internal, dengan mempertimbangkan penerapan teknologi yang lebih efisien, dapat membantu dalam penyebaran informasi yang lebih baik di seluruh bagian pemerintah.
4. Pelatihan Berkala: Penyelenggaraan pelatihan rutin terkait teknologi informasi dan keterampilan komunikasi interpersonal dapat meningkatkan pemahaman pegawai terhadap teknologi yang digunakan serta efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
5. Penyempurnaan SPIP: Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi SPIP perlu terus dilakukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam seluruh proses pemerintahan.
6. Pengawasan yang Berkelanjutan: Melakukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus melalui pemeriksaan rutin atau situasional sebagai sistem peringatan dini terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas.

Penerapan saran-saran ini secara bertahap diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan efektivitas, serta merespons tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas-tugas

pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., & Halim, A. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 4(1), 323-336.
- Arisman, A., Putriyani, A., & Afandi, A. (2018). Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dalam perspektif islam. *Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 294-304.
- Asti, M. J. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 353-364.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160-169.
- BPK.RI. ikhtisar hasil pemeriksaan. Retrieved from [bpk.go.id: https://www.bpk.go.id/ihps](https://www.bpk.go.id/ihps)
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh kualitas pengelola keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah(SPIP) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 263-271.
- Damayanti, I. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95-102.
- Hamid, A., Garusu, I. A., Rauf, D. M., Breemer, J., & Sultraeni, W. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 239-254.
- Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419. Jakarta.

Indonesia. 2021. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422. Jakarta.

Kiayi, S. N., Canon, S., & Mattoasi, M. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 166-179.

Kusaeri, G., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1173-1182.

Kusuma, D. T. (2019). Efektivitas Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Di Kota Malang (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Paneo, F., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2017). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

Pemkot Gorontalo Target SPIP Naik Level. (2021, juni 21). Retrieved from tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1475075/pemkot-gorontalo-target-spip-naik-level>

Prastya, Y. R. (2020). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN MENGGUNAKAN SPIP